

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Permana (2014: 89-90), kerusakan ekologi pada dasarnya adalah kerusakan mekanisme pengorganisasian diri alam akibat kekacauan mekanisme *feedback* antarjaring level sistem yang terdiri dari kuark, atom, molekul, jaringan, organ, tumbuhan, hewan, manusia, bumi, planet, bintang, galaksi, cluster, hingga keutuhan alam semesta. Hal tersebut dikarenakan sebagian dari level sistem telah kehilangan peran dan fungsinya akibat nafsu keserakahan manusia yang menjadikan alam sebagai objek penjarahan. Dalam hal ini, kerusakan atau degradasi lingkungan merupakan akibat dari perilaku individu, masyarakat, bahkan pemerintah dalam proses pembangunan suatu wilayah yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Sesuai dengan hasil kajian Khalid (dalam Permana, 2014: 108) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi selalu berbanding lurus dengan kerusakan ekologi, tepatnya penjarahan sumber daya alam yang berakhir pada bencana.

Sama halnya di Kota Yogyakarta, di satu sisi pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta di tahun 2017 mencapai 5,24% meningkat dibanding tahun 2016 yang mencapai 5,11%. Bahkan secara regional, pertumbuhan ekonomi tersebut berada sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY yang mencapai 5,26%. Di mana menurut lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi pada kategori penyediaan akomodasi, makan, dan minum yaitu mencapai 6,85%, termasuk di

dalamnya ialah jasa penginapan (hotel, apartemen, dan lain-lain) yang mendukung bagi perkembangan pariwisata di Kota Yogyakarta (BPS Kota Yogyakarta, 2018). Akan tetapi, di sisi lain kualitas lingkungan hidup Kota Yogyakarta semakin buruk dan mengkhawatirkan. Di mana buruknya kualitas lingkungan hidup tersebut dinilai dari empat indikator.

Indikator pertama dilihat dari semakin berkurangnya RTH akibat alih fungsi lahan menjadi bangunan (Mukarramah & Suprayogi, 2014), yang kemudian diperkuat oleh temuan Taurizina & Firdaus (2017) dengan mengungkapkan bahwa pola perubahan RTH dominan menjadi bangunan, dan perubahan RTH paling banyak terjadi pada sawah. Selanjutnya, indikator kedua dilihat dari buruknya kualitas air sumur warga (Mukarramah & Suprayogi, 2014) dan tercemarnya air sungai Winongo, Code, dan Gajah Wong akibat limbah dari aktivitas hotel dan industri (Wibowo, 2015). Selain itu, sumur-sumur warga di sekitar pembangunan hotel juga menjadi kering (Astuti, 2017: 108).

Kemudian, indikator ketiga dilihat dari jumlah sampah yang terus bertambah dari tahun ke tahun seiring peningkatan jumlah penduduk (Mulasari, 2016: 101). Sama dengan permasalahan di kota-kota metropolitan seperti Jakarta dan Surabaya (Nurmandi, 2014: 275), keterbatasan lahan untuk dijadikan TPA Sampah menyebabkan sampah Kota Yogyakarta harus dibuang ke daerah lain yaitu ke TPA Piyungan, Kabupaten Bantul, dan mendapat respon negatif dari masyarakat yang terkena dampak dikarenakan keberadaan TPA menyebabkan pencemaran air dan bau` (Sulistyaningsih, 2015: 67). Bahkan lebih mengkhawatirkan lagi, berdasarkan observasi yang pernah penulis lakukan, sampah plastik di TPA tersebut

menjadi pakan sapi ternak warga setempat yang diperjualbelikan dan dikonsumsi dagingnya.

Sedangkan pada indikator terakhir dilihat dari polusi udara berupa emisi CO<sub>2</sub> dengan jumlah 1.037.784,78 ton/tahun, yang hampir 98% berasal dari sektor energi, dan diperkirakan akan cenderung meningkat dari tahun ke tahun (Laporan Akhir DLH Kota Yogyakarta, 2017). Data tersebut diperkuat oleh temuan Astuti & Firdaus (2017) sebagai berikut.

Tabel 1.1 Kandungan CO<sub>2</sub> di Kota Yogyakarta

No.	Nama Tempat	Kandungan CO <sub>2</sub>	Suhu (°C)
1	0 KM Yogyakarta	973,2 PPM	37 °C
2	Lingkungan Taman Pintar	496,8 PPM	35 °C
3	Bunderan UGM	450,1 PPM	36 °C
4	Depan Brinjarjo	825,9 PPM	37 °C
5	Perempatan Gramedia	449,5 PPM	32 °C
6	Lingkungan Mandala Krida	461,0 PPM	35 °C
7	Lingkungan Stasiun Tugu	530,2 PPM	33 °C
8	Jl Kusuma Negara	506,5 PPM	33 °C
9	XT Square	431,1 PPM	32 °C
10	Lingkungan Stasiun Lempuyangan	471,1 PPM	32 °C

(Sumber: Astuti & Firdaus, 2017)

Berdasarkan tabel di atas, kandungan CO<sub>2</sub> di beberapa titik keramaian di Kota Yogyakarta melebihi nilai ambang batas rata-rata yang seharusnya di bumi, yaitu sekitar 381 PPM. Emisi CO<sub>2</sub> paling banyak ada di titik 0 KM Yogyakarta. Tidak hanya itu, polusi udara juga berkaitan dengan suhu panas akibat perubahan RTH menjadi bangunan dan jalan beraspal yang berimplikasi terhadap kenyamanan termal suatu pemukiman (Nurhidayat & Marwasta, 2018: 5). Adapun emisi CO<sub>2</sub> merupakan akibat dari penggunaan bahan bakar untuk memasak (Nugrahyu dkk, 2017), untuk kendaraan, penggunaan listrik, dan produksi sampah (Wikansari & Nurjani, 2018).

Berbagai permasalahan lingkungan di Kota Yogyakarta seperti yang telah dipaparkan di atas tentu tidak sejalan dengan predikatnya sebagai Kota Ramah Lingkungan yang sekaligus sebagai salah satu ciri keistimewaannya. Warga kota terlihat semakin acuh terhadap lingkungan, ditambah lagi pembangunan fisik berorientasi ekonomi yang terus berlanjut, meskipun jelas-jelas mendatangkan kerusakan bagi lingkungan. Di mana Pemerintah Kota dan para kalangan akademisi pun turut membenarkan pembangunan fisik seperti hotel dan mall, bahkan mengabaikan suara korban pembangunan (Apriando, 2015). Sebuah tanda tanya besar atas naluri ekologi warga dan Pemkot itu sendiri. Maka di sinilah urgensi kajian pada gerakan penyelamatan terhadap lingkungan.

Sebelum degradasi lingkungan memasuki kondisi benar-benar krisis seperti sekarang ini, isu lingkungan hanya dijadikan sebagai alat protes terhadap kebijakan pembangunan (Aditjonoro, 2013). Kemudian, berkembang menjadi fokus isu serius yang benar-benar diperjuangkan melalui lembaga-lembaga negara. Sebut saja KLH di tingkat pusat yang fokus mengontrol pembangunan melalui kebijakan AMDAL. Selanjutnya, di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota, ada DLH melalui program-programnya yang bertujuan untuk menjaga kualitas lingkungan. Namun, hingga saat ini kehadiran lembaga-lembaga tersebut masih menjadi pertanyaan publik.

Jangkauan khususnya KLH dinilai masih sangat terbatas, bahkan belum sepenuhnya bisa mengintervensi pembangunan yang dilakukan pemerintah. Masih banyak ketidakseimbangan antara pembangunan dengan lingkungan akibat abai terhadap kebijakan AMDAL. Dan pada akhirnya mendapat respon dengan lahirnya gerakan lingkungan yang diinisiasi oleh organisasi non-pemerintah (*NGO*) seperti

*Earth Hour* (EH), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), dan berbagai komunitas berdaya kota yang menyorot isu lingkungan, seperti gerakan Jogja Asad yang ramai diperbincangkan di Kota Yogyakarta.

Gerakan Jogja Asad gincar berkampanye dan memberikan edukasi lingkungan kepada masyarakat baik secara langsung melalui aksi teaterikalnya, maupun melalui media baru seperti *youtube*. Selain itu, dalam aksinya yang cukup radikal, Jogja Asad juga aktif mengkritik dan memprotes program-program pembangunan hotel dan mall oleh Pemkot Yogyakarta yang dinilai merusak lingkungan tempat tinggal warga sekitar pembangunan.

Sesuai dengan temuan Sulistyaningsih (2015: 64), fenomena tersebut merupakan bentuk respon masyarakat atau aktor Jogja Asad terhadap inisiasi pembangunan hotel dan mall sebagai stimulan yang dimaknai berdampak negatif bagi lingkungan kota dan warga kota. Meskipun pada akhirnya respon dalam bentuk tindakan tersebut tidak membuahkan hasil sesuai tujuan gerakan, tetapi tetap tindakan tersebut telah berkontribusi dalam menyadarkan publik bahwasanya pembangunan hotel dan mall telah menyebabkan degradasi lingkungan dan warga sekitar harus menanggung risikonya. Selain itu, gerakan Jogja Asad juga dapat dinilai sebagai suatu perlawanan terhadap sistem ekonomi kapitalis. Tindakan ini sesuai dengan apa yang diupayakan dalam Etika Ekologi Panenteisme Islam secara praktis (Hamsah dkk, 2014: 106-108)

Berangkat dari kegagalan yang dialami oleh gerakan lingkungan tersebut, di tempat yang berbeda beberapa gerakan berhasil membawa aspirasi masyarakat sampai pada level kebijakan publik, seperti gerakan *civil society* di Sumatera Barat

(Amri dkk, 2016: 1824). Dengan begitu, masyarakat pun mulai mempertanyakan kehadiran *civil society* yang kekuatannya mampu mengimbangi kekuatan Pemkot Yogyakarta sebagai aktor pembangunan yang dominan. Di manakah gerakan-gerakan yang bisa mendorong terciptanya kondisi lingkungan Kota Yogyakarta yang seyogyanya diharapkan?

Sehubungan dengan gerakan lingkungan, di sisi lain ada organisasi kemasyarakatan (ormas) Muhammadiyah sebagai perwakilan *civil Society* yang terus berupaya menggiatkan agama Islam termasuk dalam kajian lingkungan. Sebagai ormas yang diperhitungkan di Indonesia, Muhammadiyah turut aktif menyorot permasalahan lingkungan khususnya di Kota Yogyakarta, namun hampir lepas dari perhatian kita. Komitmen Muhammadiyah terhadap perbaikan kualitas lingkungan ini terbukti dengan dibentuknya lembaga khusus dalam merespon permasalahan lingkungan, yaitu Majelis Lingkungan Hidup (MLH). Adapun program yang digaungkan oleh MLH mulai dari gerakan *eco-masjid*, shodaqoh sampah, hingga dibentuknya Sekolah Sungai yang saat ini ramai diperbincangkan di media.

Dengan demikian, ada beberapa alasan yang menjadikan penelitian ini menarik untuk dilakukan. Pertama, di tengah kondisi masyarakat Islam yang masih kurang merespon masalah lingkungan, kehadiran organisasi keagamaan yang berfokus pada isu lingkungan terbilang baru, sehingga eksistensi Muhammadiyah melalui lembaga MLH menyumbang dinamika tersendiri dalam gerakan lingkungan. Kedua, berbeda dari gerakan lingkungan kebanyakan, gerakan Muhammadiyah pasca kemerdekaan hingga sekarang menunjukkan aksi damai atau tidak radikal. Dan terakhir ialah, Muhammadiyah dengan basisnya yang besar di

Kota, harapannya akan lebih mudah memobilisasi warga kota untuk berpartisipasi aktif dalam upaya perbaikan dan penyelamatan terhadap lingkungan sesuai dengan ajaran Islam..

Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kota Yogyakarta sebagai tempat Muhammadiyah pertama kali lahir dan berkembang pesat. Pemilihan lokasi penelitian Kota Yogyakarta ini juga berangkat dari kondisi degradasi lingkungan Kota Yogyakarta seperti dijelaskan di muka yang sudah sangat krisis. Selain itu, Kota Yogyakarta juga merupakan lokasi yang terpilih untuk dijadikan *pilot project* dari salah satu program MLH, yaitu dengan dibentuknya Sekolah Sungai Muhammadiyah sebagai inovasi pendidikan lingkungan dan sekolah sungai pertama di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah “bagaimana gerakan lingkungan oleh Majelis Lingkungan Hidup PDM Kota Yogyakarta dalam merespon degradasi lingkungan di Kota Yogyakarta?”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan ialah untuk menggali lebih dalam terkait ideologi yang mendasari lahir dan berkembangnya gerakan lingkungan Muhammadiyah beserta hubungannya dengan MLH PDM Kota

Yogyakarta, strategi dalam pencapaian tujuan gerakan, hingga kontribusinya terhadap perbaikan kualitas lingkungan hidup Kota Yogyakarta.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memperkaya referensi terkait urgensi gerakan lingkungan dan peran civil islam, serta efektifitas kerja sama antar*stakeholder* dalam memecahkan permasalahan lingkungan perkotaan. Selain itu, penelitian ini harapannya juga dapat memberi kontribusi khususnya Ilmu Pemerintahan dalam kajian pembangunan berkelanjutan atau tata kelola pemerintahan perkotaan.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan lingkungan perkotaan yang sosialis, ekologis, dan berkelanjutan sesuai dengan ajaran Islam.
- 2) Bagi akademisi, penelitian ini dapat meningkatkan kualitas akademik dalam melakukan studi lapangan ekologi perkotaan dan upaya pemecahan terhadap kompleksitas permasalahan lingkungan perkotaan.
- 3) Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pembangunan wilayah perkotaan yang *sustainable* dan berbasis *stakeholder governance* dalam upaya memecahkan masalah lingkungan perkotaan yang kompleks.

## 1.5 Kajian Pustaka

Pada bagian kajian pustaka terdahulu ini akan dipaparkan terkait gerakan lingkungan baik yang diinisiasi oleh Pemkot maupun kelompok berdaya kota sebagai *civil society*. Kemudian, pembahasan juga terkait metode gerakan untuk melihat efektivitas atau keberhasilan dari suatu gerakan, baik oleh gerakan yang konsen di masalah lingkungan ataupun tidak. Selain itu, akan dibahas juga terkait kajian terhadap gerakan civil islam khususnya gerakan Muhammadiyah. Dan pada bagian terakhir pembahasan akan diarahkan pada hubungan antara agama (praktek spiritual, keimanan) dengan pelestarian lingkungan.

Gerakan lingkungan yang diinisiasi oleh Pemkot dapat dipahami dari temuan Mulasari dkk (2014) yang mengungkapkan bahwa, kebijakan pengelolaan sampah sebagai bentuk respon Pemkot terhadap permasalahan lingkungan di Kota Yogyakarta. Pada tahap implementasinya, kebijakan pengelolaan sampah mengalami banyak kendala dalam hal infrastruktur, sumber daya, dan kerangka kelembagaan pelayanan publik. Selain itu, temuannya juga memperlihatkan bagaimana usaha kerja sama antar Pemkot dengan Pemerintah Kabupaten lainnya dalam menutupi masalah keterbatasan lahan Kota yang bisa digunakan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah.

Kemudian, dalam riset selanjutnya Putra dan Alia (2015) mengungkapkan bahwa pembangunan Bank Sampah (BS) oleh Pemkot dalam rangka optimalisasi tercapainya tujuan kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, ternyata tidak mampu berjalan maksimal. Di mana BS yang ada belum begitu ampuh mereduksi timbulan sampah dan masih perlu ditingkatkan. Temuan ini diperkuat kembali dalam temuan berikutnya (Mulasari dkk, 2016) dengan menyatakan

bahwa, Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun menjadi penyumbang sampah terbesar di TPA Piyungan. Permasalahan sampah Kota Yogyakarta berkembang semakin kompleks. Mulai dari masalah pelayanan, pencemaran air sungai, perilaku masyarakat yang belum baik dalam mengelola sampah, keterbatasan umur teknis TPA Piyungan, keberadaan TPS ilegal di perbatasan kota, illegal *dumping* sampah, dan masalah anggaran.

Pada konteks yang sama, riset yang dilakukan oleh Haerul dkk (2016) di Kota Makassar menunjukkan bahwa, meskipun Pemkot sudah mengupayakan optimalisasi kerja BS melalui beberapa program pengembangan, tetap saja partisipasi masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masih kurang. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan komitmen perubahan sikap dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gerakan lingkungan yang diinisiasi oleh Pemkot sendiri belum mampu memecahkan permasalahan lingkungan di kota. Hal itu terbukti dari produksi sampah yang masih terus meningkat dan permasalahan-permasalahan baru yang muncul pada tahap implementasi kebijakan persampahan. Oleh karena itu, pembahasan terkait metode gerakan seperti yang akan dibahas selanjutnya dinilai sangat penting dalam mendukung keberhasilan suatu gerakan lingkungan di perkotaan.

Selanjutnya, riset Thorik (2015) tentang studi banding atas gerakan bersepeda yang diinisiasi oleh Pemkot dan komunitas di Kota Yogyakarta, meskipun gerakan bersepeda tersebut tidak semata-mata lahir untuk merespon kondisi lingkungan (seperti polusi udara misalnya), tetapi setidaknya kedua gerakan ini berkontribusi terhadap kualitas udara Kota Yogyakarta. Sedangkan dari temuannya menunjukkan bahwa dukungan *people power* (Walikota), kampanye

dan penggunaan media untuk menggalang massa sangat penting bagi keberhasilan suatu gerakan.

Temuan tersebut pun diperkuat oleh temuan Sudibyo dkk (2013) yang mengungkapkan bahwa, gerakan lingkungan dengan pendekatan media yang akrab bagi remaja sangat penting untuk menarik antusiasme remaja dalam melakukan gerakan penghijauan. Yang kemudian diperkuat kembali oleh temuan Sari dan Siahainenia (2015) dengan menunjukkan keberhasilan suatu gerakan sosial *online* sebagai gerakan sosial baru dalam menggerakkan massa.

Selanjutnya, temuan terbaru Sanjaya (2017) kembali mempertegas urgensi media dalam suatu gerakan lingkungan. Di mana temuannya memperlihatkan bagaimana kekuatan wacana dalam gerakan sosial yang bersifat digital atau melalui petisi *online* berhasil menggerakkan massa dalam upaya penyelamatan terhadap lingkungan. Lebih jelasnya, kedudukan media dalam gerakan lingkungan khususnya di wilayah perkotaan diperjelas dalam temuan Puspita dan Dewi (2013) yang mengungkapkan bahwa, upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum berkontribusi terhadap perbaikan kondisi lingkungan yang buruk dan tidak terawat dikarenakan partisipasi masyarakat masih relatif rendah dalam program gerakan Kampung Hijau dan tidak semua masyarakat mengetahui program Kampung Hijau. Artinya, sosialisasi gerakan lingkungan “Kampung Hijau” masih kurang.

Pada temuan riset terbaru oleh Mukti (2018) pun menunjukkan eratnya kaitan antara partisipasi masyarakat dengan penggunaan media terhadap keberhasilan gerakan lingkungan di wilayah Kota, khususnya Kota Yogyakarta. Selain itu, temuan Mukti juga memaparkan bagaimana keberhasilan gerakan

Kampung Hijau di Kota Yogyakarta sebagai output dari keterlibatan atau partisipasi dan kerja sama yang terjalin antara pemerintah, *privat sector*, dan *civi society* atau masyarakat kota dalam mendukung program Kampung Hijau. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dan keberlanjutan dari gerakan lingkungan di wilayah kota dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu; (1) partisipasi dan kerja sama antartiga pilar *governance*, (2) media kampanye, dan (3) metode gerakan baik secara *online* maupun *offline*.

Pada kajian selanjutnya, temuan Jinan (2015) dalam risetnya yang berjudul “Muhammadiyah Studies: Transformasi Kajian tentang Gerakan Islam di Indonesia”, mengungkap kajian-kajian terhadap muhammadiyah sebagai gerakan Islam, gerakan ekonomi, pendidikan, dan sosial-politik diklasifikasikan dalam tiga periode. Pada periode pertama (1912-1950), kajian terhadap Muhammadiyah lebih bersifat ideologis atau berkisar pada karya-karya kebangkitan pada zaman kolonial. Pada periode kedua (1950-2000), kajian terhadap Muhammadiyah terkait hubungan kehidupan beragama dengan pertumbuhan ekonomi, gerakan pemurnian islam, keberhasilan Muhammadiyah dalam membangun jaringan lembaga pendidikan, lembaga kesejahteraan rakyat, dan rumah sakit, hingga masalah pluralisme agama kaitannya dengan konflik antara Islam dan Kristen. Sedangkan pada periode ketiga (2000-sekarang), kajian terhadap Muhammadiyah dengan pendekatan budaya populer, yaitu melihat hubungan antara agama dan pariwisata, bentuk nyata tajdid (pembaruan) Muhammadiyah dalam dunia seni dan pendidikan melalui novel, film, teater dan komik, hingga kemunduran peran negara bangsa dan menonjolnya peran aktor non-pemerintah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kajian terhadap gerakan lingkungan Muhammadiyah masih terbilang baru.

Matin (2012) salah seorang muslim Amerika sekaligus pemerhati lingkungan mengemukakan gagasannya tentang Agama Hijau atau *Green Deen*. Dalam kajiannya ia melihat islam sebagai agama yang mengajarkan cinta yang mendalam kepada planet ini. Gagasan Agama Hijau sebagai solusi mengatasi degradasi lingkungan. Di mana dalam empat problema utama lingkungan yang disebutkan seperti masalah limbah, energi, air, dan makanan relevan dengan permasalahan yang ada di Kota Yogyakarta saat ini. Matin pun mengulas secara utuh bagaimana masalah-masalah lingkungan tersebut hadir, kemudian dikaitkan pada enam prinsip Agama Hijau yang mengantarkan pembaca pada pemahaman tentang peran individu sebagai penjaga bumi, yang dalam istilah Al-Qur'an disebut *Khalifah*.

Sehubungan dengan itu, Sururi (2014) pun mengungkap hubungan degradasi lingkungan dengan cara dan sikap beragama seseorang. Dalam risetnya ia memaparkan bahwa agama sebagai pedoman moral dalam upaya menyelamatkan lingkungan (teologi lingkungan). Surui juga memaparkan terkait prinsip cinta dan kasih sayang islam terhadap makhluk hidup maupun makhluk mati yang harus diperlakukan selayaknya manusia. Di mana prinsip ini tidak jauh berbeda dengan prinsip etika yang ditekankan dalam ekofeminisme, bahwa semua makhluk hidup berhak untuk mendapat perlindungan, tidak disakiti, dirawat, dan dipelihara. Ekofeminisme memandang degradasi lingkungan sama halnya dengan eksploitasi terhadap perempuan yang dikarenakan perempuan dijadikan makhluk nomor dua dari laki-laki.

Berdasarkan kajian terhadap beberapa literatur di atas, maka penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih berfokus pada gerakan

lingkungan yang diinisiasi oleh Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi *civil society* yang dipercaya lebih mudah menyampaikan (mendakwahkan) etika ekologi sesuai dengan ajaran Islam kepada khalayak. Dalam hal ini, Muhammadiyah melalui MLH PDM Kota Yogyakarta yang gerakannya dilakukan secara *offline* dan *online*. Di mana dalam penelitian ini akan mengkaji terkait ideologi yang mendasari lahirnya gerakan lingkungan oleh MLH PDM Kota Yogyakarta, penggunaan media, serta metode yang ditempuh untuk optimalisasi kesuksesan gerakannya dalam merespon degradasi lingkungan di Kota Yogyakarta.

## **1.6 Kerangka Teori**

### **1.6.1 Teori Interaksionisme Simbolik**

Respon Civil Islam dalam hal ini organisasi Muhammadiyah melalui MLH PDM Kota Yogyakarta dapat dipahami dan dijelaskan dengan teori Interaksionisme Simbolik Herbert Blumer dalam Sulityaingsih (2015). Teori Interaksionisme Simbolik menyebutkan bahwa seseorang dalam menyikapi atau merespon sesuatu berdasarkan makna yang berarti bagi dirinya. Kajian Sulistyaningsih dalam risetnya menggunakan teori tersebut mengungkap bahwa keberadaan TPA Piyungan Kabupaten Bantul memunculkan respon baik positif maupun negatif dari masyarakat. Respon masyarakat tersebut muncul melalui interpretasi dalam proses interaksi sosial yang terjadi. Di mana keberadaan TPA Piyungan mendapat respon positif karena dinilai bermanfaat bagi ekonomi khususnya masyarakat setempat. Kemudian, mendapat respon negatif dikarenakan keberadaannya menyebabkan pencemaran air dan bau serta membuat anak-anak malas bersekolah.

Mengacu pada teori ini, gerakan lingkungan oleh MLH PDM Kota Yogyakarta dapat dikaji dari dua sisi. Pertama, gerakan lingkungan merupakan bentuk respon dari anggota MLH PDM Kota Yogyakarta sebagai penduduk asli Kota Yogyakarta, di mana mereka adalah orang yang terkena dampak secara langsung dari degradasi lingkungan di Kota Yogyakarta. Kedua, gerakan lingkungan oleh MLH PDM Kota Yogyakarta merupakan respon berupa komitmen dalam menjalankan tugas yang diamanahi oleh MLH PPM atas dasar pemaknaan yang diberikan terhadap urgensi dari program MLH PPM untuk kemudian diterapkan di Kota Yogyakarta sesuai dengan masalah dan potensi yang ada.

## 1.6.2 Gerakan Sosial Baru dalam Isu Lingkungan dan Agama

### 1.6.2.1 Gerakan Lingkungan

Konsep ini mengacu pada konsep gerakan sosial baru atau gerakan sosial modern yang dipopulerkan oleh Situmorang dalam disertasinya yang berjudul “Gerakan Sosial: Teori dan Praktik”. Urgensi gerakan sosial baru ini dapat dipahami dari empat ciri utamanya (Situmorang, 2013: 24-25), yaitu:

- a. Memandang dan menempatkan aktivitas gerakan sosial sebagai sebuah aksi kolektif yang rasional dan memiliki nilai positif.
- b. Memperbaiki dan mengkontekstualisasikan teori-teori gerakan sebelumnya ke dalam era kekinian.
- c. Semakin banyaknya riset dan studi gerakan sosial di negara-negara di luar Amerika Utara dan Eropa Barat yang membuat kajian gerakan sosial semakin kaya.

- d. Teori gerakan sosial modern berhasil mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang memfasilitasi tumbuhnya gerakan sosial, kuat lemahnya, dan berhasil atau tidaknya sebuah gerakan sosial.

Situmorang (2013: 6-55) menyebutkan ada enam teori yang lazim digunakan untuk memahami fenomena tumbuh dan berkembangnya gerakan sosial baru, yaitu; teori keluhan, teori struktur kesempatan politik, teori struktur mobilitas sumberdaya, teori *framing prproses*, teori repertoire, dan teori *contentious politic*. Kemudian, kaitannya dengan gerakan lingkungan yang dilakukan oleh Muhammadiyah melalui Majelis Lingkungan Hidup (MLH) dalam penelitian ini, maka teori-teori yang ada akan membantu untuk memahami faktor atau latar belakang lahirnya gerakan lingkungan oleh MLH, bagaimana MLH menggerakkan sumberdaya internalnya, sejauh mana upaya MLH membingkai atau melakukan *framing* atas isu lingkungan, penggunaan media, dan strategi lainnya dalam rangka pencapaian tujuan gerakan.

#### 1.6.2.2 Etika Ekologi Panenteisme Islam

Munculnya Etika Ekologi Panenteisme Islam merupakan bentuk kritik terhadap empat paradigma yang sebelumnya digunakan dalam mengkonspesikan etika ekologi, yaitu paradigma teosentris, antroposentris, ekosentrisme atau *feed ecology*, dan antropokosmik (Hamsah dkk: 2014: 91-95). Kemudian, alasan penulis mengadopsi konsep ini ialah atas dasar bahwa konsep Etika Ekologi Panenteisme Islam tersebut mampu menjelaskan posisi dan relasi antara manusia, alam, dan Tuhan yang menurut penulis lebih sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, konsep ini lebih cocok untuk mengkaji gerakan lingkungan Muhammadiyah sebagai organisasi *civil society* yang berbasis agama Islam.

Kata Panenteisme dipopulerkan pertama kali oleh seorang Filsuf Idealis Jerman bernama Karl Friedrich C. Krause (1781-1832). Ia menggunakan kata Panenteisme untuk menengahi pandangan teisme dan panteisme. Sedangkan secara etimologi, panenteisme berasal dari bahasa Yunani, “nav” (pan) “all (seluruh), “ev” (en) “in (dalam), “beoc” (Theos) “God” (Tuhan), yang berarti “all in God”, yaitu keyakinan bahwa dunia ada di dalam kemahakuasaan Tuhan.

Menurut Permana, Etika Ekologi ialah refleksi kritis atas nilai, aturan hidup, dan kebiasaan masyarakat dalam kaitannya dengan pelestarian ekosistem alam (Hamsah, 2014: 101). Di mana refleksi tersebut didasarkan pada dua hal; (1) manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah dan ditunjuk sebagai khalifah al-Ard (Garda Ekologi) dan (2) organisme baik manusia maupun non-manusia memiliki hak-hak kodrati dan terikat dalam penghambaan kepada Allah SWT. Kemudian, dikarenakan dua landasan tersebut menunjukkan bahwa etika ekologi berkaitan dengan relasi manusia, alam, dan Tuhan maka “Etika Ekologi” pun digabung dengan kata “Panenteisme Islam” yang bertujuan untuk memberikan karakter khas doktrin Islam pada etika ekologi, sehingga etika ekologi memiliki pijakan dasar teologis. Adapun prinsip dasar Etika Ekologi Panenteisme Islam yang dapat dijadikan sebagai acuan secara ideal dalam menjaga lingkungan (Hamsah, 2014: 101-103), antara lain ialah:

a) Tauhid (*Oneness*)

Tauhid berarti syahadah (persaksian) manusia akan kemanunggalan Tuhan dan kebenaran risalah kenabian Muhammad SAW, serta *selfrealization*. Di mana syahadah manusia akan kesatuannya dengan semua etintas duniawi (manusia dan non-manusia) di dalam satu kesatuan

organisasional alam yang terinterdependensi dan resiprokal. Di mana syahadah diri berarti kesadaran bahwa manusia, bersama dengan makhluk lain non-manusia terikat dalam penghambaan total kepada Allah. Di mana syarat mutlak syahadah manusia akan keesaan Tuhan dan kebenaran risalah kenabian Muhammad SAW akan bermakna jika manusia mempunyai rasa simpati dan empati kepada sesama manusia dan kelestarian ekosistem alam.

b) Khalifah (Stewardship)

Manusia sebagai makhluk Allah yang dianugerahi potensi kreatif berupa kehendak bebas, tanggung jawab, adil, dan kemampuan manajerial. Di mana potensi tersebut merupakan fitrah dasar manusia agar ia mampu mengoptimalkan perannya sebagai khalifah di muka bumi, yang memiliki tanggung jawab untuk membuat aturan atau sistem nilai yang mengatur hubungan mutualisme antara manusia dan alam. Dalam hal ini, manusia bertindak sebagai manajer yang harus bertanggungjawab dalam pemeliharaan, pendayagunaan, tata kelola, dan distribusi sumber daya alam secara optimal.

c) Mizan (Earth Balance)

Eksistem bumi merupakan satu kesatuan organisasional yang secara struktural terpilah ke dalam level-level sistem yang terjalin dalam relasi *interdependence*, tidak ada yang terisolir atau berdiri secara *independen*. Kemudian, dalam relasi kesalingbergantungan tersebut setiap level memberdayakan dirinya agar bisa berperan dan berguna untuk yang lain. Oleh karena itu, antarlevel sistem membutuhkan kemitraan simbiosis mutualisme dengan saling bertukar energi dan materi secara timbal balik

(*feedback*) untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya, sekaligus menciptakan keseimbangan ekosistem bumi secara keseluruhan. Proses *feedback* dapat dipahami dari siklus daur ulang rantai makanan.

### 1.6.3 Civil Society

#### 1.6.3.1 Definisi *Civil Society*

Menurut Jean L. Cohen dan dan Andreo Harato, konsep tentang *civil society* berangkat dari pemikiran Aristoteles dalam istilah *politike koinonia* yang dipergunakan untuk menggambarkan suatu masyarakat politik dan etis, di mana warga negara di dalamnya berkedudukan sama di depan hukum (Masroer dan Dermawan, 2016 :36-37). Dalam pandangannya, Aristoteles menyadari bahwa terdapat dualitas antara negara (*polis*) dengan masyarakat (*oikos*), di mana masyarakat di sini bukan bagian dari lembaga negara, dan fungsinya sebagai wadah komunikasi dan interaksi masyarakat yang secara teoritis melalui pimpinan masing-masing dalam berhubungan dengan negara. Dengan demikian, Cohen dan Harato melihat bahwa gambaran *politike koinonia* telah menunjukkan adanya dua entitas yang berbeda; *pertama*, '*community of society*' yang bersifat homogen dalam arti kesatuan kolektif yang terorganisir sebagai wadah negara dengan tujuan tunggal sebagai derivasi dari masyarakat di satu pihak. *Kedua*, '*society*' di lain pihak meliputi bentuk-bentuk interaksi yang bersifat pluralistik berupa kelompok atau asosiasi yang tidak resmi.

Kemudian, Dawam Rahardjo menyatakan, secara harfiah *civil society* dicetuskan oleh Cicero (106-43 SM) yang merupakan terjemahan dari istilah Latin (*civilis societas*) yang yang pengertiannya mengacu kepada gejala budaya perorangan masyarakat (Masroer dan Dermawan, 2016 :37). *Civil society*

disebutnya sebagai sebuah masyarakat politik (*political society*) yang beradab dan memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan hidup. Sama halnya dengan pandangan pemikir-pemikir pencerahan dari Scotlandia seperti Ferguson, Hume, dan Adam Smith yang mengidentikkan *civil society* dengan masyarakat beradab (*civilizen society*) yang tidak lagi berasosiasi sebagai (*political society*) melainkan berorientasi pada organisasi material (*economic society*).

Selanjutnya oleh pemikir-pemikir dari Jerman seperti Kant, Fichte, dan Hegel memberikan pemaknaan terhadap konsep *civil society* sebagai suatu kesatuan yang terpisahkan dari negara (Masroer dan Dermawan, 2016: 40). Kant memandang *civil society* sebagai tujuan umat manusia yang hidup berdasarkan hukum dan menolak menyatukan diri sebagai bagian dari kekuasaan absolut. Fichte juga melihat adanya keterpisahan hubungan antara negara dan masyarakat di satu pihak dan hubungan antara individu berdasarkan univesalitas di pihak lain. Sementara, Hegel memandang bahwa *civil society* dan negara selain sebagai entitas yang berbeda, juga sebagai sintesa atau negasi dua entitas yang berlawanan, di mana *civil society* diintegrasikan ke dalam negara sebagai domain yang harus menyesuaikan perilakunya dengan kepentingan negara.

Selain itu, Antonio Gramsci dan John Keane memberikan pandangan yang berbeda terhadap konsep *civi society*. Gramsci memandang *civi society* sebagai arena hegemoni, yang tujuan utamanya untuk melakukan penguatan *civi society* adalah sebagai instrumen guna melakukan *counter* terhadap negara. Sementara, Keane memandang bahwa *civi society* adalah arena sosial yang mengandung nuansa kebebasan, perserikatan, sukarela, dan keberagaman pemerintah. Selain itu, Keane juga melihat adanya hubungan yang setara antara negara dan *civi society*

mengandung distribusi kekuasaan keanekaragaman wilayah publik yang terdapat di dalam dan di antara negara dan *civil society* (Masroer dan Dermawan, 2016).

Kemudian, Masroer dan Dermawan (2016: 44) mengungkapkan bahwa *civil society* mengandung tiga hal yakni agama, peradaban, dan perkotaan. Dari asal katanya, pada umumnya *al-din* diartikan sebagai agama, kemudian memiliki keterkaitan dengan makna *al-tamaddun* yang berarti peradaban, dan kedua kata ini menyatu dalam sebuah pengertian *al-madinah* yang arti harfiahnya adalah kota. Secara terminologi, *civil society* adalah masyarakat yang berlandaskan agama sebagai sumbernya, peradaban sebagai prosesnya, dan masyarakat kota adalah hasilnya.

Selanjutnya, Larry Diamond (dalam Jones dkk: 2015) mendefinisikan *civil society* sebagai warga negara yang bertindak secara kolektif dengan cara yang bersifat sukarela, otonom dari negara, dan terikat oleh tatanan hukum atau seperangkat aturan bersama. Di mana kelompok ini memiliki peran penting dalam membatasi peran negara dengan mencari perubahan kebijakan atau menuntut akuntabilitas. Selain itu, menurut Diamond kelompok ini mendukung pluralisme, sehingga mereka mengeluarkan berbagai kelompok fundamentalis serta kelompok lain yang berusaha untuk memonopoli ruang fungsional atau ruang politik dalam masyarakat, serta mengklaim jalan mereka sebagai satu-satunya jalan yang sah.

Berdasarkan beberapa konsep dan definisi tentang *civil society* di atas dapat disimpulkan bahwa *civil society* adalah warga negara yang bertindak secara kolektif dengan cara yang bersifat sukarela, otonom dari negara, terikat oleh seperangkat aturan bersama, yang hubungannya setara dengan negara dan mengandung

distribusi kekuasaan keanekaragaman wilayah publik, di mana penulis lebih relevan kepada teori yang diungkapkan oleh John Keane dan Larry Diamond.

#### 1.6.3.2 Pola Hubungan Negara dan *Civil Society*

Dalam beberapa kasus, para ahli membedakan pola hubungan negara dan masyarakat dalam dua kategori pokok (Amri dkk, 2016: 1823), yaitu:

- a. Negara kuat (*superior*), sementara masyarakat lemah (*inferior*).

Pola hubungan ini dapat ditemukan pada negara yang menganut sistem pemerintahan yang totaliter dengan kekuasaan absolut. Di Indonesia, pola hubungan seperti ini amat terasa di era Orde Lama (1959-1966) dan Orde Baru (1966-1998). Di mana pemerintah cenderung menutup ruang publik yang bertujuan untuk mempertahankan status *quo*, sehingga *civil society* tidak dapat tumbuh sesuai dengan habitatnya.

- b. Negara dan masyarakat sama-sama kuat.

Pola hubungan ini dapat ditemukan pada negara yang menganut sistem demokrasi. Di Indonesia pola hubungan semacam ini terasa di era demokrasi parlementer (1950-1959) dan era Reformasi (1998-sekarang). Pemerintah cenderung membuka ruang publik yang memberi peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam berbagai kebijakan atau program pemerintah, sehingga *civil society* memiliki peluang untuk tumbuh dan berkembang di bawah sistem ini.

Belajar dari *civil society* di Sumatera Barat yang telah menorehkan keberhasilan melalui perjuangan dari dalam lingkungan birokrasi pemerintah, Amri dkk (2016: 1824) mengungkap dalam temuannya bahwa ada empat cara yang

ditempuh oleh *civil society* hingga dapat berperan aktif dalam proses perumusan program dan kebijakan pemerintah, antara lain yaitu:

- a. Dalam menghadapi dominasi negara, *civil society* merubah identitas dan metode perjuangannya dari gerakan perlawanan kelompok kepentingan atau penekan menjadi organisasi *civil society*.
- b. Tanpa mengorbankan tujuannya, *civil society* merubah strategi perjuangannya dari relasi konflikual ke arah relasi kolaborasi, yang kemudian dengan keahlian atau *skill* tertentu mereka para aktor *civil society* masuk ke dalam organisasi tertentu yang memiliki akses ke pemerintahan seperti partai politik dan lembaga negara, menjadi staf ahli di dinas atau instansi terkait untuk melakukan advokasi dalam pelaksanaan program tertentu, serta menjadi tenaga pendamping dalam penyusunan program-program pemerintahan.
- c. Isu-isu yang diusung bergeser dari hal-hal yang bersifat universal ke isu yang bersifat lokal, sehingga langsung menyentuh persoalan riil yang dialami masyarakat.
- d. *Civil society* berhasil masuk ke dalam struktur negara dalam artian menggeser fungsi tradisionalnya sebagai lembaga yang berada di luar struktur negara.

## **1.7 Definisi Konseptual**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses penelitian ini, definisi konseptual dalam penelitian dibatasi pada:

- a. Gerakan lingkungan adalah bentuk kongkrit dari respon terhadap degradasi lingkungan, hingga strategi kelompok aksi lingkungan yang bertujuan untuk menjaga lingkungan lokal dan masyarakat yang terkena dampak dari degradasi lingkungan.
- b. Civil Islam dalam hal ini ialah Muhammadiyah (melalui Majelis Lingkungan Hidup) sebagai salah satu organisasi *civil society* yang di dalam gerakannya ada upaya menggiatkan ajaran Islam di ranah publik dan berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan publik.

## 1.8 Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan indikator-indikator sebagai berikut.

- a. Gerakan lingkungan oleh MLH PDM Kota Yogyakarta, dengan indikator:
  - a) Respon terhadap degrassi lingkungan.
    - (a) Adanya program/kegiatan peletarian lingkungan.
    - (b) Adanya partisipasi dalam pelaksanaan program/kegiatan pelestarian lingkungan.
    - (c) Adanya budaya lingkungan aktor MLH PDM Kota Yogyakarta (ecological habitus).
  - b) Terdapat upaya dalam pencapaian tujuan gerakan.
    - (a) Adanya distribusi pengetahuan ke warga Muhammadiyah dan masyarakat umum.

- (b) Adanya penggunaan media dalam upaya framing isu lingkungan.
  - (c) Adanya kreativitas dalam pengembangan dan inovasi program.
  - (d) Adanya agenda atau kerja sama dengan pihak eksternal.
  - (e) Terdapat program kerja antara MLH PDM Kota Yogyakarta dengan pihak eksternal.
  - (f) Terdapat forum berkala antara MLH PDM Kota Yogyakarta dengan pihak eksternal.
  - (g) Terdapat rencana program ke depan.
- b. Civil Islam, dengan indikator:
- a) Adanya perubahan gerakan ke gerakan organisasi *civil society*.
    - (a) Adanya pelembagaan atau institusionalisasi.
    - (b) Adanya upaya menggiatkan ajaran islam.
    - (c) Adanya kolaborasi dengan pihak eksternal.
  - b) Adanya partisipasi dalam proses perumusan kebijakan publik.
    - (a) Terdapat aktor MLH PDM Kota Yogyakarta dalam lembaga pemerintahan Kota Yogyakarta.
    - (b) Adanya keterlibatan dalam proses perumusan kebijakan publik (kebijakan lingkungan Kota Yogyakarta).

- (c) Adanya produk hukum (kebijaka lingkungan Kota Yogyakarta) yang diinisiasi MLH PDM Kota Yogyakarta.

## **1.9 Metodologi Penelitian**

### **1.9.1 Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian studi kasus yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara ketat rekonstruksi suatu kasus dengan subjek penelitian bisa individu, komunitas sosial, organisasi, maupun institusi (Fawaid, 2017:349). Kemudian, untuk metode penelitian menggunakan metode kualitatif yakni berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri (Usman & Akbar, 2014: 78). Jenis dan metode penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui secara deskriptif bagaimana gerakan lingkungan yang dilakukan oleh Majelis Lingkungan Hidup (MLH) PDM Kota Yogyakarta dalam merespon degradasi lingkungan di Kota Yogyakarta.

### **1.9.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Yogyakarta.

### **1.9.3 Jenis data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan bersumber langsung dari subjek utama penelitian (Dawson dalam Elfiyanti, 2018: 42). Sedangkan data sekunder adalah dokumen pendukung berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan dokumen pemerintah yang berkaitan dengan topik penelitian

(Dawson dalam Elfiyanti, 2018: 42). Lebih detailnya, berikut tabel jenis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1.2 Data Primer

No.	Nama Data Primer
1	Hasil wawancara dengan pak Hery Setiawan (Ketua MLH PDM Kota Yogyakarta, PIC program Eco-masjid dan Sodaqoh Sampah).
2	Hasil wawancara dengan pak Haris Usman (Sekertaris MLH PDM Kota Yogyakarta, PIC program Memanen Air Hujan dan Sekolah Sungai Muhammadiyah).
3	Hasil wawancara dengan pak Subandono (LPMK Karangwaru, Pengelolaan Sungai Buntung)
4	Hasil wawancara dengan pak Mudjijana (Pengelola Sungai Winongo, Jatimulyo Baru)
5	Hasil wawancara dengan pak Sadiran (Ketua RT Tegalrejo, Pengelola lahan kosong untuk tanaman sayuran bernilai ekonomi atau Pertanian Perkotaan)
6	Hasil observasi di MLH PDM Kota Yogyakarta sebagai lokasi program, dan rumah beberapa aktor MLH PDM Kota Yogyakarta dan PCM Tegalrejo.

Tabel 1.3 Data Sekunder

No.	Nama Data Sekunder
1	Dokumen publikasi MLH PDM Kota Yogyakarta, seperti: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leaflet Biopori, Mengelola Air Sekitar Kita, dan #shodaqoh Sampah.</li> <li>2. Berita penyelenggaraan Workshop Memanen Air Hujan di SMA Muhammadiyah 1 Kota Yogyakarta.</li> </ol>
2	SK kepengurusan MLH PDM Kota Yogyakarta.
3	Dokumen Laporan Pelaksanaan Program MLH PDM Kota Yogyakarta tahun 2015-2020.
4	Dokumen Laporan Pelaksanaan Program MLH PPM tahun 2015-2020.
5	Foto dokumentasi pelaksanaan program MLH PDM Kota Yogyakarta.

#### 1.9.4 Unit Analisis Data

Sehubungan dengan kajian penelitian ini yaitu gerakan lingkungan oleh MLH PDM Kota Yogyakarta dalam merespon degradasi lingkungan di Kota

Yogyakarta, maka penulis melakukan kegiatan penelitian dengan MLH PDM Kota Yogyakarta, MLH PPM, MLH PCM Tegalrejo, dan RT/RW di beberapa Kelurahan yang ada di Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta sebagai pihak yang dianggap relevan dan tepat untuk dijadikan sumber data.

#### 1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penjelasan dari tiga teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### a) Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung (Usman & Akbar, 2014: 55). Jenis wawancara dalam penelitian ini ialah wawancara semi terstruktur, artinya penulis membuat draft pertanyaan wawancara sebagai pedoman, akan tetapi pertanyaan yang diajukan tidak harus sama persis dengan pedoman sehingga memperbesar kemungkinan bagi penulis berimprovisasi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Kemudian, untuk narasumber yang dipilih dalam tahap wawancara selain anggota MLH PDM Kota Yogyakarta juga dengan beberapa petugas lapangan di tingkat Kelurahan yang merupakan kader dari Muhammadiyah. Adapun dalam tahap wawancara ini, narasumber yang penulis pilih ialah:

1. Ketua MLH PDM Kota Yogyakarta.
2. Sekertaris MLH PDM Kota Yogyakarta.
3. Ketua RT Jatimulyo sebagai Pengelola Pertanian Perkotaan.

4. Ketua LPMK Karangwaru sebagai Pengelola Sungai Buntung.
5. Dosen PTM sekaligus Pengelola Sungai Winongo.

b) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Usman & Akbar, 2014: 52). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi partisipatif, yaitu penulis terlibat langsung secara aktif dalam obyek yang diteliti dengan ikut terlibat di beberapa kegiatan MLH PDM Kota Yogyakarta maupun kegiatan di tingkat kelurahan seperti ikut serta dalam rapat pimpinan di PDM Kota Yogyakarta dan kegiatan tubing di sungai Winongo, Kelurahan Kricak.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen (Usman & Akbar, 2014: 69). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi, disertasi, dan berita yang berkaitan dengan topik penelitian.

## 1.9.6 Populasi dan Sampel

### 1.9.6.1 Populasi

Populasi adalah semua nilai, baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai kelompok objek yang lengkap dan jelas (Usman dan Purnomo, 2014: 42). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Yogyakarta yang terhimpun dalam organisasi Muhammadiyah. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 12 majelis

ditambah tujuh lembaga yang ada di lingkungan PDM Kota Yogyakarta, yang terdiri dari 314 anggota sesuai dengan data PDM Kota Yogyakarta.

#### 1.9.6.2 Sampel

Sampel ialah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan teknik sampling (Usman dan Purnomo, 2014: 43). Adapun teknik sampling dalam peneliti ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan memilih secara khusus anggota sampel berdasarkan tujuan penelitian (Usman dan Akbar, 2014: 45). Berdasarkan pengertian tersebut, pada penelitian ini penulis mengambil beberapa sampel. Sampel pertama yaitu MLH PDM Kota Yogyakarta sebagai organ resmi Muhammadiyah di tingkat daerah yang diamanahi dalam menjalankan program Muhammadiyah di bidang lingkungan. Kedua, mitra sekaligus sasaran MLH PDM Kota Yogyakarta di Kecamatan Tegalrejo dan Mergansan atau warga Muhammadiyah sebagai petugas lapangan yang mengkoordinir pelaksanaan program di tingkat Kelurahan, RT maupun RW.

#### 1.9.7 Teknik Analisis Data

Menurut Usman dan Akbar (2014: 84), analisis data ialah kegiatan analisis mengkategorikan data untuk mendapatkan pola hubungan, tema, menaksirkan apa yang bermakna, serta menyampaikan dan melaprkannya kepada orang lain yang berminat. Adapun secara garis besarnya, analisis data menurut Usman dan Akbar (2014, 84-85) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

- a) Reduksi data, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian kita.
- b) Display data, yaitu menyajikan data dalam bentuk matriks, *network*, grafik, dan sebagainya.

- c) Pengambilan keputusan dan verifikasi, yaitu mencoba mengambil kesimpulan dengan berusaha mencari makna dari sekian banyak data yang diperoleh dan melakukan verifikasi dengan cara mengumpulkan data baru.

Analisis data selanjutnya dilakukan mengikuti teori triangulasi menurut Flick (2017: 424) yang dipahami sebagai strategi yang menuntun pada pemahaman yang lebih mendalam tentang isu yang diteliti dan sebagai langkah menuju pengetahuan yang lebih besar, bukan semata-mata menuju validasi dan objektivitas interpretasi. Selain itu, triangulasi sebagai strategi untuk menjustifikasi dan mendasari pengetahuan kita dengan memperoleh pengetahuan tambahan yang lain (Denzin dan Lincoln dalam Flick, 2017: 424-425).